

PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL PENILIKAN II
KINERJA PHPL

PT SUNTARA GAJAPATI
(Pemegang IUPHHK HTI)
PROVINSI RIAU

Oleh

PT TUV RHEINLAND INDONESIA



IDENTITAS LPPHPL PT TÜV Rheinland Indonesia

1.	Nama Lembaga	:	PT TÜV Rheinland Indonesia
2.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-016-IDN
3.	Alamat	:	PT TÜV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 - Jakarta
4.	Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	Phone / Fax : 021-579 44 579 / 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com
5.	Pengurus Lembaga VLK	:	<u>Komisaris Utama:</u> Ralf Scheller <u>Komisaris:</u> Andreas Hoefler DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana <u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila <u>Direktur:</u> Edmundus Wiharyono Abdul Qohar <u>General Manager Sustainability Assurance:</u> Dian S. Soeminta, S.Hut
6.	Standar	:	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standard dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
7.	Tim Auditor	:	1. Ichsan Setyowibowo (Aspek Prasyarat) 2. Heni Handayani (Aspek Produksi) 3. Ibrohim Prayetno (Aspek Ekologi) 4. Achmad Kosasihi (Aspek Sosial) 5. Ichsan Setyowibowo (Aspek VLK)
8.	Pengambil Keputusan	:	Dian S. Soeminta, S.Hut

IDENTITAS PERUSAHAAN PT SUNTARA GAJAPATI PROVINSI RIAU

1	Organisasi / Auditee	PT Suntara Gajapati
2	Lokasi	Sungai Sembilan, Kabupaten Dumai, Provinsi Riau
3	Alamat Kantor	<u>Kantor Pusat :</u> Jl. Pinang Sejahtera No. 27, Pekanbaru, Riau Telp. 0761-7053939 Fax. 0761 – 29617
4	Kategori UM	Pemegang IUPHHK Hutan Tanaman
5	IUPHHK – HA	SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 71/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 seluas 34.792 ha.
7	Akte pendirian perusahaan	Akte notaris nomor: 99 tanggal 17 Juni 1993, yang diterbitkan oleh Notaris Koesen yang diangkat sebagai pengganti dari Singgih Susilo berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri di Pekanbaru nomor: W4.De.01.10-1102 tanggal 7 Juni 1993
8	Jenis Produk	Produksi kayu hutan tanaman, jenis Acacia mangium, A. crassicarpa
9	Pemegang Saham	Sunarta 97,8% Dandis 1,1% Rina 1,1%
10	Pengurus	<u>Komisaris :</u> Rina <u>Direksi :</u> Direktur Utama : Sunarta Direktur : Dandis

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan (Secara daring)	15 Desember 2021 Ruang Pertemuan Camp Basilam PT SGP dan masing- masing lokasi auditor. (Remote Audit)	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Manager Camp dan para PIC bidang yang diaudit dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15 – 18 Desember 2021 Kantor dan lokasi PT SGP	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standard dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT
Pertemuan Penutupan	18 Desember 2021 Ruang Pertemuan Camp Basilam PT SGP	Pertemuan penutupan dihadiri oleh Manajer Camp dan PIC pendamping serta Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
Pengambilan Keputusan	Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A	Penilaian Kinerja PHPL		
1	Prasyarat		
1.1	Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HT	Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan • Berdasarkan Laporan Hasil Penataan Batas Sendiri Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT Suntara Gajapati dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HT PT Ruas Utama Jaya, IUPHHK-HA PT Diamond Raya Timber di Kota Dumai Provinsi Riau, PT Suntara Gajapati telah merealisasikan tata batas areal kerja 100 % (temu gelang). • Terdapat konflik batas dengan pihak lain dan ada upaya PT Suntara Gajapati untuk menyelesaikan konflik secara terus menerus mengacu kepada dokumen rencana, monitoring konflik batas dan upaya penyelesaian • Fungsi kawasan hutan pada areal kerja PT Suntara Gajapati tidak mengalami perubahan sejak diberikan izin pengelolaan hutan tanaman industri oleh pejabat yang berwenang, namun terkait dengan adanya perubahan ketentuan adanya fungsi kawasan gambut PT Suntara Gajapati telah melakukan perubahan perencanaan (RKUPHHK-HTI periode 2017-2026) sesuai peraturan yang berlaku. • Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan namun melihat perkembangan 5 tahun terakhir belum terlihat perkembangan pengurangan yang signifikan • Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal IUPHHK-HT PT Suntara Gajapati dan terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mencapai penguasaan 50,46 % dari areal kerja PT Suntara Gajapati
1.2	Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	<ul style="list-style-type: none"> • PT SGP telah memiliki Dokumen Visi, Misi dan Komitmen Perusahaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PT SGP pada Januari 2017. Dokumen Visi Misi tersebut telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi kegiatan pengelolaan hutan lestari (kelola produksi, kelola ekologi, kelola sosial) yang telah dilakukan PT Suntara Gajapati baru sebagian yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan • Ganis PHPL PT Suntara Gajapati di lapangan tersedia pada bidang perencanaan hutan (Ganis PHPL Canhut 2 orang dan Ganis PHPL Kurpet 0 orang), bidang pembinaan hutan (Ganis PHPL Binhut 3 orang), dan bidang pemanfaatan hutan (Ganis PHPL PKB-R 5 orang dan Ganis PHPL Nenhut 2 orang). • Realisasi peningkatan kompetensi tenaga professional bidang kehutanan dan bidang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan >70% dari rencana sesuai kebutuhan • Dokumen ketenagakerjaan PT Suntara Gajapati tahun 2021 tersedia lengkap, meliputi Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan, Dokumen K3 dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Dokumen Terkait Upah Minimum Povinsi (UMP), Hubungan Industrial, SOP Ketenagakerjaan, Serikat Pekerja.
1.3	<p>Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPH HK – HTI</p>	Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi perusahaan. • PT SGP telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) baik software dan hardware maupun perangkat pendukung lainnya, serta terdapat SDM sebagai tenaga pelaksana SIM. • PT SGP telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen milik Kementerian LHK dan terdapat tenaga pelaksana yang ditunjuk direktur perusahaan untuk mengoperasikan sesuai dengan ketentuan • Organisasi <i>SPI/internal auditor</i> PT SGP ada dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan produksi lestari.
1.4	<p>Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)</p>	Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan penebangan yang direncanakan PT SGP pada Blok RKT 2021 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat yaitu Kelurahan Basilam Baru dan Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai telah mendapat persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai.

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<ul style="list-style-type: none"> • Pada periode Penilikan II Tahun 2021 terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari masyarakat desa binaan PT SGP. • Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak (minimal 50%)
2	Produksi		
2.1	Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun dengan pertimbangan deliniasi mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. • Penataan areal kerja (blok RKT RTT dan compartment/petak) hanya sebagian (> 50%) yang sesuai dengan RKUPHHK. • Tanda batas blok dan petak kerja seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.
2.2	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	<ul style="list-style-type: none"> • PT. SGP telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi 3 tahun terakhir dengan kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll). • PT. SGP telah memiliki data hasil pengukuran riap tegakan/PSP untuk seluruh tipe ekosistem yang ada dan telah dianalisis dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi PHPL dan Instansi yang membidangi Litbang LHK dan dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume).
2.3	Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> • PT. SGP telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan system silvikultur dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis serta telah mengimplementasikan sebagian SOP tahapan sistem silvikultur (minimal 50%). • PT. SGP masih memiliki potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (≥ 120 m³/Ha) • PT. SGP memiliki permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ($\geq 75-89\%$) dari jumlah tanaman perhektar`sesuai jarak tanam yang dipergunakan
2.4	Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> • PT. SGP memiliki SOP pemafaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	hutan		<p>karakteristik kondisi setempat dan telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faktor Eksploitasi (FE) kegiatan pemanenan PT. Suntura Gajapati ≥ 0.70.
2.5	Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan /pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> • PT. SGP memiliki dokumen RKT lebih dari 50 % (dari periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. • PT. SGP memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi masih terdapat beberapa kegiatan dalam RKT yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan Peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan RKT yang disahkan secara self approval. • PT. SGP telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. • Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis PT. Suntura Gajapati mencapai 70-105% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT revisi yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6	Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi keuangan PT. SGP menunjukkan Likuiditas 100-150%, Solvabilitas $< 100\%$, dan Rentabilitas meningkat walaupun masih ada yang bernilai negatif dan Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar dengan Pengecualian • Realisasi alokasi dana yang dikeluarkan oleh PT. SGP $> 80\%$ dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) • Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan PT. SGP kurang proporsional (perbedaan $> 20-50\%$). • Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan PT. SGP masih berjalan lancar sesuai dengan tata waktu • Realisasi kegiatan penanaman tanaman pokok

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>PT. SGP lebih dari 80%, namun untuk tanaman kehidupan masih sangat rendah < 80%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realisasi penanaman tanaman pokok PT. SGP > 50% dan tanaman kehidupan < 50% dari yang seharusnya.
3	Ekologi		
3.1	Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Luas kawasan lindung yang ditetapkan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL/UKLUPL, RKUPHHK-HT dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya. • Tidak terdapat penambahan realisasi penandaan batas kawasan lindung pada pada penilikan ke-2 (2021) dibandingkan dengan penilikan ke-1 (2020) dan resertifikasi (2019), yaitu seluas 3741 ha atau 72,18% dari luas keseluruhan kawasan lindung. Terdapat kegiatan pemeliharaan batas kawasan lindung di sempadan Sungai Buluhala. Batas-batas kawasan lindung dikenali dan terdapat penandaannya. • Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup 51 – 79% dari luasan kawasan lindung dan ada kegiatan rehabilitasi/pengkayaan. • Tidak terdapat KFLEG ataupun Puncak Kubah Gambut di areal PT SGP, sehingga PT SGP tidak memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan peneglolaan gambut sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan. • Alokasi kawasan lindung PT SGP telah ditetapkan melalui SK Direksi (2019), dan sesuai dengan dokumen perencanaan (RKUPHHK), disosialisasikan kepada para pihak terkait terutama kepada masyarakat sekitar. Terdapat bagian dari luasan kawasan lindung yang menjadi obyek klaim (okupasi). Tidak terdapat bentuk khusus pengakuan masyarakat terhadap kawasan lindung. Masih terdapat gangguan terhadap kawasan lindung. Sebagian kecil (< 50%) para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung. • Tersedia laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping/sesuai RKL/RPL.
3.2	Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> • PT SGP memiliki sejumlah prosedur terkait kegiatan perlindungan hutan. Prosedur perlindungan gangguan hutan mencakup

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>sebagian besar jenis gangguan yang ada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan tersedia dengan jenis dan jumlahnya masih ada yang belum dipenuhi dan berfungsi dengan baik. • SDM perlindungan hutan, untuk RPK jumlah dan kualifikasi personil memadai, untuk pengamanan hutan menggunakan pihak penyedia jasa tenaga pengamanan hutan • Terdapat kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (<i>preemptif preventif / represif</i>) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada, namun masih terjadi gangguan berupa kebakaran hutan dan lahan
3.3	Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> • PT SGP telah menyediakan pedoman/prosedur/instruksi kerja pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan telah mempertimbangkan dokumen RKL-RPL PT SGP yang ada. • Tersedia sarana dan prasarana untuk pemantauan kualitas fisik air dan tanah, sarana tersebut dipasang dan dipantau menurut sesuai dengan ketentuan dan juga arahan dari kementerian. Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan seperti AMDAL dan berfungsi dengan baik. • Tersedia SDM untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan kualifikasi GANISPHL-BINHUT sebanyak 1 orang. • Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan • Kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan dapat ditunjukkan dalam hasil pemantauan parameter/aspek masing-masing dampak serta dilaporkan kepada institusi yang berwenang. • Berdasarkan hasil pemantauan terhadap parameter tanah dan air selama periode penilikan, diketahui tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air
3.4	Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka	Baik	<ul style="list-style-type: none"> • PT SGP telah memiliki prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	(endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik		<p>yang terdapat di areal pemegang izin, dimana telah dilengkapi dasar/acuan yang jelas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
3.5	<p>Pengelolaan flora untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> • PT SGP juga telah memiliki prosedur prosedur pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. • PT SGP melakukan kegiatan pengelolaan jenis flora dilindungi melalui kegiatan pengelolaan kawasan. Pengelolaan kawasan meliputi penetapan, penandaan, penjagaan, monitoring dan rehabilitasi. Belum terdapat kegiatan pengelolaan secara khusus terhadap suatu jenis tertentu • Meskipun secara data tidak menunjukkan perubahan yang signifikan namun adanya gangguan berupa klaim lahan dapat menjadi gangguan terhadap kondisi seluruh species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
3.6	<p>Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</p>	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia beberapa prosedur/pedoman /instruksi kerja yang terkait dengan pengelolaan fauna dilindungi dan RTE. Upaya yang dilakukan berdasarkan pengelolaan kawasan. Prosedur mengacu kepada peraturan dan dokumen yang terkait. • Berdasarkan rekaman data/dokumen dan uji petik lapang menunjukkan bahwa terdapat implementasi pengelolaan fauna dengan pendekatan pengelolaan kawasan, seperti penetapan, penataan, penjagaan dan monitoring kawasan lindung. • Indeks keanekaragaman jenis satwaliar di areal kawasan lindung PT SGP cenderung rendah sampai sedang. Satwaliar mengalami gangguan baik karena kegiatan operasional maupun aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. PT SGP melakukan berbagai kewajiban terkait dengan perlindungan terhadap satwaliar yang ada.
4	Sosial		
4.1	Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit	Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia dokumen yang memuat: pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		<p>adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Dokumen tersebut berupa Dokumen AMDAL, Studi Diagnostik PMDH 2012, Laporan Social Impact Assessment 2014, MoU dengan Masyarakat s/d 2020, Dokumen RKU 2017-2026, Dokumen RKT 2020 dan 2021, RKAP, RKL/RPL 2021. Terdapat klaim areal oleh masyarakat dan sebagian secara on going diselesaikan disertai MoU untuk dikelola secara kemitraan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan berupa SOP Penataan batas partisipatif dan SOP penyelesaian konflik lahan. • Hak-hak dasar masyarakat adat/setempat diakui (diakomodir) melalui mekanisme yang tersedia berupa beberapa SOP : SOP Program Social Forestry, SOP Pengelolaan Kawasan Tanaman Kehidupan, SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional dan Adat, Hak Dasar, dll Masyarakat Dalam Kawasan Konsesi, SOP Free Prior Informed Consent. • Kawasan kehidupan masyarakat berada di dalam areal dan di luar areal. Yang berada di luar areal jelas batasnya melalui penataan batas yang sudah temu gelang, namun belum pengukuhan. Sementara kawasan kehidupan masyarakat yang berada di dalam areal (baik berupa Klaim areal dan permukiman) sebagian sudah di deliniasi berupa parit dan tanaman masyarakat (karet, hortikultur, padi, dll). • Para pihak yang memberikan persetujuan terhadap eksistensi PT Suntara Gajapati: Pihak Pemerintah melalui berbagai SK, Pihak Perusahaan lain yang berbatasan melalui Dokumen BATB dan Sebagian Masyarakat melalui partisipasi dalam proses penataan batas, dan MoU untuk areal klaim yang telah diserahkan ke perusahaan (kemitraan)
4.2	Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggung jawab sosial perusahaan termuat di beberapa dokumen mulai dari Visi-Misi, SK IUPHHK, AMDAL, RKU, RKT, SOP, dan Laporan pelaksanaan (program CD, Penerimaan karyawan lokal, dan kegiatan sosialisasi) • Pemenuhan kewajiban sosial perusahaan kepada masyarakat adat/setempat dilaksanakan melalui mekanisme yang tersedia berupa beberapa SOP yang lengkap dan legal, contoh: SOP Pembinaan dan Pengembangan Usaha

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>Masyarakat (koperasi, Usaha Keci)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara dokumen dan faktual di lapangan (proses wawancara) bahwa PT Suntara Gajapati telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial. • PT Suntara Gajapati telah merealisasikan tanggung jawab sosial berupa penerimaan tenaga kerja lokal, program CD, dan kegiatan sosialisasi yang disertai dengan bukti yang lengkap baik secara dokumen (BAP, Notulen, daftar hadir/jumlah peserta, dan foto) dan fakta lapangan (hasil wawancara). • Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi, namun tidak ada laporan monitoring sebagaimana di SOP
4.3	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang masyarakat hukum adat dan /atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. • Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai pemenuhan kewajiban social pemegang izin terhadap masyarakat. • Dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tersedia di PT Suntara Gajapati berupa: RKU, RKT, dan RKAP. Sementara itu belum ada dan dokumen Studi Dasar Sosekbud Masyarakat sebagai acuan CSR/CD dan tidak ada dokumen Rencana Operasional (RO) yang memuat tata waktunya. • Terdapat bukti implementasi sebagian besar (> 50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. • Terdapat dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap & jelas.
4.4	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat mekanisme Panduan Penyelesaian Konflik Dimana mekanisme tersebut satu bentuk metode dalam analisa konflik; penyusunan strategi dan rencana kerja penyelesaian konflik; dan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan. • PT SGP telah memiliki Laporan Pemetaan Potensi Konflik sesuai P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 (ditujukan ke Dinas Kehutanan dan BPHP); namun belum lengkap sesuai dengan P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat struktur organisasi penyelesaian konflik lahan yang sudah didukung/diketahui para pihak, namun belum menggambarkan keterlibatan pihak eksternal sebagaimana di SOP dan alokasi/kebijakan dana/anggaran belum tersedia/memadai • Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik tersedia namun tidak lengkap dan kurang jelas..
4.5	Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	<ul style="list-style-type: none"> • PT. SGP telah merealisasikan sebagian hubungan industrial dengan karyawan (Perjanjian Kerja Bersama, Lembaga Kerjasama Bipartit, Serikat Pekerja, Laporan ketenagakerjaan, kontrak karyawan). • PT SGP telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi. • PT SGP memiliki dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan • Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya
B	Verifikasi Legalitas Kayu		
1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)		
	a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT SGP memegang ijin pengelolaan Nomor 71/Kpts-II/2011 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT. Suntara Gajapati Atas Areal Seluas ±34.792 Ha Di Provinsi Riau
	b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT SGP telah melakukan pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) tanggal 22 Desember 2000 sejumlah Rp. 90.459.200,- sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan dan tidak melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan
	c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT SGP mempunyai data penggunaan kawasan selain IUPHHK didalam areal kerjanya. Terdapat penggunaan kawasan selain kegiatan IUPHHK di areal kerja PT SGP yang belum mengantongi izin pinjam pakai dari Kementerian LHK
2.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1	RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
	a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan	Memenuhi	Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKTUPHHK PT Suntara Gajapati beserta

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	<p>Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. ▪ Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval ▪ □ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 		lampirannya dipenuhi seluruhnya
	b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Suntara Gajapati memiliki peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan
	c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta blok/petak tebangan disahkan (dicap), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan
2.2	Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pe-manfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya
	b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada	Tidak diterapkan	Tidak terdapat kegiatan penebangan di hutan alam untuk penyiapan HTI

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	areal penyiapan lahan yang di-izinkan untuk pem-bangunan hutan tanaman industri		
3.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1	Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Memenuhi	Seluruh LHP yang diterbitkan dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang Uji Petik terhadap fisik kayu di TPK Hutan/Antara dengan dokumen tidak dapat diterapkan
3.1.2	Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
	Surat keterangan sahnya hasil hutan & lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	1. Kayu yang diangkut dari TPK Hutan/Logpond ke tujuan pengiriman kayu dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan. 2. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMHH sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait
3.1.3	Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin IUPHHK-HT		
	a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak	Tidak diterapkan	PT SGP tidak memproduksi kayu bulat dari hutan alam
	b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Tidak diterapkan	PT SGP tidak memproduksi kayu bulat dari hutan alam
3.1.4	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampiran-nya untuk hutan tanaman	Memenuhi	Arsip Dokumen SKSHHK Periode Desember 2020 s/d November 2021 ke tujuan pengiriman tersedia lengkap dan sah.

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.2	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP(kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan
	b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PSDH PT SGP telah dibayar lunas dan Bukti Penerimaan Negara telah sesuai dengan dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian Lembaga atas PSDH yang diterbitkan SIPNBP-SIMPONI
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	Pembayaran PSDH oleh PT SGP telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku
3.3	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)		
	Dokumen PKAPT	Tidak diterapkan	Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau
3.3.2	Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Setiap kapal pengangkut kayu PT SGP adalah kapal berbendera Indonesia
3.4	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Seluruh kayu bulat menggunakan Tanda V-legal sesuai ketentuan
4.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.1.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT SGP memiliki dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan
4.1.2	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
	a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan sesuai dengan rekomendasi yang tercantum dalam dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan, dan telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1	Prosedur dan Implementasi K3		
	a. Implementasi prosedur K3	Memenuhi	PT SGP memiliki Prosedur Standar Operasional K3, memiliki Ahli K3 Umum berikut Susunan P2K3 yang telah disahkan.
	b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik
	c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja di PT. SGP, yaitu: Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau Pengurus Unit Kerja (PUK) PT SGP. Serikat Pekerja telah terdaftar di Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Dumai
5.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
	Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
5.2.3	Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT SGP tidak mempekerjakan pekerja yang masih dibawah umur

Sertifikat

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelangkaan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V- Legal/Isensi FLEGT.

No. Registrasi Sertifikat 624 407 150005

Pemilik Sertifikat: PT TÜV Rheinland Indonesia mensertifikasi
Pemegang PBPH : PT SUNTARA GAJAPATI

Kantor Pusat :
Jalan Pinang Sejahtera Nomor 27, Pekanbaru – Provinsi Riau.
Telp/Fax: (0761) 29617

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH):
SK Menteri Kehutanan Nomor 71/Kpts-S/2001 tanggal 15 Maret 2001

Ruang Lingkup: Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan luas areal ± 34.792 ha di Kota Dumai, Provinsi Riau

Terbukti telah memenuhi Standar Penilaian PHPL sesuai :

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 1 tentang Pedoman dan Standar PHPL pada Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan, dan Lampiran 1.3 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT, dengan nilai akhir kinerja berpredikat **BAIK**.

Masa Berlaku: Sertifikat berlaku dari 19-01-2020 sampai 18-01-2026.
Rev.01

Jakarta, 11 Januari 2021


PT TÜV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. J. H. R. Rasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta

© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks, Unimaster and Application Manager prior approval.

www.tuv.com

